

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. *Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017*. Sleman. Melalui:
<http://www.slemankab.go.id/10795/dana-desatahunanggaran-2015-2016-2017.slm>. Diakses
pada 10 November 2019
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desadan Pengelolaan Kekayaan
Desa*. Pekanbaru: Red Post Press.
- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi
Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Jember:
Universitas Jember.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Titiek Puji, dan Yulianto. 2016. *Good governance Pengelolaan Keuangan Desa
Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Berkala Akuntansi dan
Keuangan Indonesia, 1 (1): 1-14.
- Bowo, 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good governance*.
Jurnal Riset *Good governance*: Universitas Sebelas Maret.
- BPKP. 2015. *Membangun Good governance Menuju Clean Government*. Warta
Pengawasan Vol. XXII/ Edisi HUT Ke-70 RI/2015, ISSN: 0854-0519. www.bpkp.go.id
- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
Jakarta.

Darmiasih Ni Kadek. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)*.

Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Buleleng.

David, Fatima., Rute Abrue, dan Odete Pinheiro. 2013. *Local Action Groups: Accountability, Sosial Responsibility and Law*. International Journal of Law and Management 55 (1): 5-27.

Deri. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APB Desa Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*. e-Journal Ilmu Pemerintahan 5(1): 121–132.

Diansari, Rani Eka. 2015. *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015.

DiMaggio, P.J. dan Powell, W.W. 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. American Sociological Review 48 (2): 147-160.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 2016. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. www.djpk.kemenkeu.go.id.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. 2015. *Kebijakan Dana Desa TA 2016*. www.djpk.kemenkeu.go.id.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kemenkeu.

- Febriato, D, dan Kurrohman. 2014. *Akuntabilitas Administrasi Desa di Jember Jawa Timur*. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan. UPI. Bandung.
- Gunawan. I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hartono, E.B. 2008. *Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa dan Implementasi Program Alokasi Dana Desa*. Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto.
- Hehamahua, Hayati. (2015). *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency*. Journal of Sosial and Development Sciences 6 (3): 15-23 ISSN 2221-1152.
- Kemendikbud. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desa>. Diakses pada 10 April 2018.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta.
- Kurniati, Poni Sukaesih. 2016. *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi 6 (2).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*. Media Keuangan Vol. XI No. 107.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017. Jakarta.
- Krina P, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Bappenas: Jakarta.
- LAN dan BPKP. 2001. *Akuntabilitas dan Good governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good governance*. Bogor.
- Madea, Yolanda, Alden Laloma, dan Very Y. Londa. 2017. *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Administrasi Publik 3(46).
- Ngongare, Yanis. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan*. Jurnal Eksekutif 1(8).
- Oktaresa, Betrika. 2015. *Analisis Hubungan Pengalaman, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan, dan Skeptisme Profesional dengan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara. Tangerang Selatan.

- Rahaditama, M,W. 2016. *Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Kasus pada 5 Desa di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Rahayu, Depi. 2017. *Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Economics Development Analysis Journal 6(2).
- Randa, Fransiskus dan Paulus Tangke. 2015. *Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability to Publik Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja*. Procedia Sosial and Behavioral Sciences 211 (2015) 665-672
- Riyanto, Andi, Acep Suherman, and Dicki Prayudi. 2016. *Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal akuntansi dan keuangan: 444– 50.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press
- Subroto. Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Aden Andri. 2006. *Formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kebumen, 2005*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Susilo, Budi. 2007. *Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

United Nation Development Program, 1997. *Dokumen Prinsip-prinsip Good governance*. Jakarta: PT. Sinar Abadi.

Warsono, Hardi dan Ruksamin. 2014. *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*. Journal of Management and Sustainability 4 (3).

Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Bandung. Fokusmedia.

Yango, MD. 1991. *Institutional Mechanism for Promoting Accountability in the Philippines Civil Service*. Vol.III. No.2. Asian Review of Public Administration

Sumber Lain

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015

Badan Pusat Statistik 2018

Direktorat Jenderal Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2016

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia 2016

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2015

Kementrian Keuangan Tahun 2016

Lembaga Administrasi Negara Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Desa No. 22 Tahun 2016

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi 49/PMK.07/2016

Undang-undang No.6 Tahun 2014

Undang-undang No. 32 Tahun 2004